



**Judul** : Butuh kolaborasi tangkal judi online  
**Tanggal** : Senin, 28 Agustus 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 1

# Butuh Kolaborasi Tangkal Judi Online

*PPATK mencatat perputaran uang judi online pada 2022 mencapai Rp81 triliun. Tahun ini diperkirakan lebih besar lagi.*

**M IQBAL AL MACHMUDI**  
*iqbal@mediaindonesia.com*

**P**ENETRASI judi dalam jaringan (daring) atau judi *online* di Indonesia kian mengkhawatirkan. Perputaran uang melalui transaksi judi *online* dari tahun ke tahun terus meningkat dan yang menjadi korban kebanyakan ialah masyarakat kelas menengah ke bawah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran uang judi daring dalam setahun kemarin saja meningkat signifikan. Pada 2021 perputaran uangnya Rp67 triliun dan melesat menjadi Rp81 triliun pada 2022. Tahun ini diproyeksikan angkanya bakal lebih besar mengingat kian gencarnya penetrasi pengembang judi *online*.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan, yang mengkhawatirkan bukan soal angkanya saja, melainkan juga dari sisi korbananya. Ia menyebut masyarakat yang melakukan judi daring tidak hanya dari kalangan orang dewasa. Ada pula yang masih berstatus pelajar sekolah.

"Ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena orang-orang yang terlibat judi juga banyak ibu rumah tangga, bahkan anak SD pun ada yang ikut. Ini yang kita khawatirkan," terang Natsir dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip dari *Antara*, Sabtu (26/8).

Terpisah, Founder Drone Emprit,

Ismail Fahmi, sepakat bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi darurat judi *online*. Penetrasi informasi soal judi semakin tidak terkendali. Bahkan situs pemerintahan pun turut digunakan pengembang judi *online* sebagai domain situs gim slot.

"Ke mana pun pergi, kita melihat informasi judi, entah di *streaming*, bahkan di situs pemerintah. Tempat kita seharusnya mendapatkan informasi layanan pemerintah, malah mendapatkan banyak informasi tentang *link* ke situs judi," ujar Ismail kepada *Metro TV*, Kamis (2/8).

Tidak hanya situs pemerintah yang jadi target sasaran, para pengembang judi *online* juga mendominasi situs pendidikan. Sebelumnya melalui akun *X* nya (dulu *Twitter*), Ismail menyebut ada 3 juta situs judi *online* yang mendominasi domain pemerintah dan 1.2 juta situs menggunakan domain situs pendidikan untuk promosi.

## Blokir konten

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeklaim telah melakukan berbagai langkah proaktif menanggulangi judi daring. Salah satunya memblokir konten konten terlarang tersebut. Dalam lima tahun terakhir, Kemenkominfo setidaknya telah memutus akses 886.719 konten judi yang menyusupi situs pemerintah. Namun, Dirjen Informasi dan Ko-

munikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong menilai pemblokiran konten saja tidak cukup. Penanganan judi daring memerlukan pendekatan komprehensif dan langkah-langkah ekstra.

"Apa yang menjadi tugas Kemenkominfo hanya satu bagian saja dari pemberantasan secara komprehensif perjudian *online* ini. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi penting. Kita sudah berkolaborasi dengan PPATK, perbankan, dan kepolisian. Kita akan intensifkan kolaborasi," ujarnya.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Ilumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan Polri dan Kemenkominfo telah melakukan MoU terkait pemberantasan judi *online*. Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan Bareskrim. Polri bila menemukan situs judi *online*. Setelah Kemenkominfo memurunkan situs itu, polisi lanjut penyelidikan. "Segera kita tindak lanjuti proses penegakan hukumnya," tutur Ramadhan, Jumat (25/8).

Dari sisi lain, pengamat sosial dari UI, Devie Rahmawati, menilai tumbuhnya pengguna judi *online* dipicu banyak orang tidak memiliki ketahanan mental kuat untuk tidak berjudi. "Seharusnya setiap orang punya ketahanan di hulu untuk tidak berjudi. Jadi mau godaan apa pun, orang tidak akan mengambil itu, apalagi modus utamajudi *online* ialah orang dilihat menang dulu," kata Devie saat dihubungi, kemarin.

Hal itu penting karena judi daring legal di banyak negara dan mudah diakses. "Karena itu, tidak bisa mengandalkan negara untuk memblokir karena akan ada terus sampai kapan pun," pungkasnya. (MGN/Yon/X-3)